**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

**ADVOKASI KIE KESEHATAN REPRODUKSI BAGI REMAJA TAHUN 2019**

**BAB. I**

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pengaruh negatif IPTEK , media sosial secara tidak langsung telah merasuki remaja, dan banyaknya cerita penyimpangan perilaku seksual remaja karena kerusakan moral dan mental. Untuk itu perlu upaya pendekatan dan arahan yang positif terhadap remaja. Untuk itu diperlukan teknik Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang akan meningkatkan pengetahuan, dan wawasan remaja serta usaha memperbaiki sikap, perilaku remaja dan keluarga serta masyarakat dalam menangani permasalahan remaja yang bisa dilakukan melalui media cetak dan elektronik serta pertemuan-pertemuan.

 Sementara advokasi kita lakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan KIE penanganan permasalahan remaja termasuk kesehatan reproduksi remaja dan ini ditujukan bagi pengambil kebijakan. Remaja yang tegar, sehat dan berprestasi tak terwujud begitu saja, peran orangtua, guru dan masyarakat sangat diperlukan. Untuk itu dibutuhkan peningkatan wawasan, pengetahuan pejabat pengelola dan pembina kelompok PIK R, yang mana kelompok PIK R sebagai wadah beraspirasi bagi remaja.

Sehubungan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Kegiatan Advokasi KIE Kesehatan Reproduksi Remaja yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 15 Agustus 2019 di Hotel Amaris Padang. Kegiatan ini menghadirkan 50 orang peserta yang terdiri dari Pejabat pengelola kelompok PIK R yang ada di Dinas PPKB dan Guru-guru Pembina kelompok PIK R sekolah Kabupaten Kota se Sumatera Barat.

**Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan**

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat
7. Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Dukcapil Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019. DPA-OPD DPPKBKPS Nomor : 1.02.08.1.02.08.01.111.001
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, Nomor : 476/78/DPPKBKPS.3/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Advokasi KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2019.

**Tujuan**

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan komitmen pejabat pengelola KB dan kelompok PIK R tentang Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi Remaja.
2. Penguatan peran kelompok PIK R dalam edukasi kesehatan reproduksi remaja.

**D. Sasaran**

- Pengelola dan Pembina Kelompok PIK R Sekolah Kabupaten Kota se Sumatera Barat

**BAB II**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. **Pra Pelaksanaan Kegiatan**

Pada pelaksanaan kegiatan ini menghadirkan 50 (lima) puluh orang peserta yang terdiri dari Pejabat pengelola kelompok PIK R yang ada di Dinas PPKB dan Guru-guru Pembina kelompok PIK R sekolah Kabupaten Kota se Sumatera Barat

Persiapan administrasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan yang disiapkan untuk melaksanakan kegiatan ini diantaranya:

* + - 1. Persiapan administrasi
		1. Penetapan tanggal dan tempat lokasi kegiatan
		2. Penetapan Narasumber
		3. Membuat/mengirim surat ke Kabupaten Kota untuk permintaan peserta dan Surat permintaan narasumber
		4. Pemesanan Spanduk Kegiatan
1. Pemesanan Makanan dan Minuman untuk kegiatan

B. **Pelaksanaan Kegiatan**

* + - 1. **Jadwal Kegiatan**

Pelaksanaan Kegiatan Advokasi KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2019 pada tanggal 14 s.d 15 Agustus 2019 di Hotel Amaris jalan Sudirman no 19 Padang

* + - 1. **Peserta**

Peserta yang diundang sebanyak 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari pembina dan pengelola kelompok PIK R sekolah

**Fasilitas Peserta**

Fasilitas yang diberikan kepada peserta mengikuti kegiatan Advokasi KIE Kesehatan Reproduksi Remaja adalah :

* + - * 1. Akomodasi peserta selama 2 hari 1 malam di Hotel Amaris Jalan Sudirman No 19 Padang
				2. Seminar Kit Peserta
1. **Metode**

Metode yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan Advokasi KIE Kesehatan Reproduksi Remaja tahun 2019 adalah :

* Ceramah/Penyampaian materi oleh narasumber
* Curah Pendapat
* Diskusi
* Tanya Jawab
1. **Narasumber**

Adapun narasumber dan moderator pada kegiatan Advokasi adalah :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Narasumber | Materi | Moderator |
| 1. | H. Novrial, SE, MA, AKtKepala Dinas PPKBKPS Prov Sumbar | Kebijakan Advokasi dan KIE Kespro Remaja | Ir Putri Reno Sari, MM |
| 2. | Kuswardani Susari Putri, S.Psi, MSiSpikolog | Strategi dalam Melakukan KIE Kespro  | Roza Ariyanti  |
| 3. | Dr. Akmal, SE, MSiTenaga Ahli dari Universitas Bung Hatta | Publik Speaking dalam melakukan Advokasi KEspro Remaja | Ermayanti Yulia |

1. **Rangkaian Acara**
2. Kegiatan yang dihadiri oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang terdiri dari Pejabat Pengelola PIK R yang ada pada OPD PPKB dan Guru-guru Pembina PIK R Sekolah Kabupaten Kota se Sumatera Barat, dibuka langsung oleh Kadis PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat ( H. Novrial , SE, MA, Akt) dalam sambutannya Kadis PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa kegiatan ini dalam upaya meningkatkan pengetahuan, wawasan dan penyamaan persepsi pejabat pengelola dan pembina kelompok PIK R dalam penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui KIE Kesehatan Reproduksi Remaja dan nanti akan dilanjutkan dengan diskusi tentang permasalahan serta tindak lanjut advokasi dan KIE kesehatan reproduksi remaja, sehingga nantinya bisa saling bersinergi dalam strategi mengadvokasi dan KIE Kespro remaja antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sesuai dengan kearifan budaya lokal yang saling terpadu dan komprehensif. Selanjutnya Kadis PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat mengharapkan kepada peserta agar mengikuti kegiatan dengan serius dan menggali ilmu dari para narasumber.
3. Pada Sesi Pertama Kepala Dinas PPKBKPS selaku salah satu narasumber pada kegiatan ini memaparkan bahwa arah kebijakan Pemerintah Provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJMD bahwa Penyusunan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat - daerah, tentang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan konseling kesehatan reproduksi remaja melahirkan Kebijakan KIE KRR terpadu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kearifan lokal Provinsi Sumatera Barat hal ini dimulai dari :

- Evaluasi Kebijakan, program, kegiatan KRR berdasarkan aturan,

- Evaluasi dari pemantauan di Kab./Kota,

 - Masukan dan saran dari Kabupaten/Kota.

Karena sudah tertuang dalam RPJMD bisa dibuat program kegiatan yang berkolaborasi antar OPD yang terkait masalah remaja seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan, dengan mensinergikan program kegiatan sesuai kewenangan OPD yang bersangkutan.

1. Pada Sesi kedua pukul 20.00 wib malam tampil Narasumber psikolog Kuswardani Susari Putri yang memaparkan Strategi KIE Kesehatan Reproduksi Remaja, Disini ibu Kuswardani menguraikan masalah remaja yang begitu komplek terlebih terkait masalah seksual dan kesehatan reproduksi, kebutuhan riil remaja untuk mendapatkan informasi akurat tentang seksualitas & kesehatan reproduksi dibedakan berdasarkan variasi kelompok. Sehingga pemenuhan kebutuhan ini butuh disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya yang dihadapi masing-masing remaja. Namun demikian, secara umum kebutuhan riil menyangkut hak dasar remaja akan informasi terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi itu, antara lain adalah :
	1. Penyediaan layanan yang ramah dan mudah diakses bagi remaja
	2. Adanya jaminan kerahasiaan
	3. Penyediaan informasi dan pemberian hak mendapatkan pendidikan pengetahuan tentang reproduksi dan seksualitas

Strategi yang efektif digunakan dalam KIE Kesehatan Reproduksi adalah melalui FGD. FGD yang merupakan kelompok diskusi terbuka tentang kondisi berbagai hal terkait dengan kerentanan dan resiko permasalahan remaja, maka melalui FGD pembina bisa langsung memberikan saran, masukan dan pembahasan. FGD dapat dibentuk melalui kelompok kecil (lebih kurang 12 orang) yang dapat difasilitasi oleh guru pembina atau Genre dalam memandu materi KRR

1. Selanjutnya pada sesi ketiga Dr. Akmal, SE , MS.i Dosen Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta menyampaikan materi publik speaking dalam Advokasi Kesehatan Reproduksi Remaja, diawali dengan mengurai kata Publik Speaking teknik berbicara mempengaruhi audience sesuai keinginan kita atau tema yang akan kita sampaikan. Hal ini bisa kita terapkan dalam menyampaikan maksud kita dalam mengadvokasi anak-anak untuk bisa mengerti tentang kesehatan reproduksi remaja dan perencanaan keluarga yang akan mewujudkan ketahanan keluarga. Selanjutnya Pak Akmal menguraikan teknik melakukan public speaking yang harus diperhatikan beberapa antara lain :
* Kesiapan Mental dan Fisik,
* Penguasaan materi, dan Audience
* Teknik Vokal dan Bahasa Tubuh
* Durasi waktu penyajian

Seorang pembicara harus punya kepribadian yang terbuka dengan hal-hal yang baru, lakukan dengan ikhlas, lakukan komunikasi timbal balik, yang disampaikan sesuai dengan fakta dan data, semua ini akan memudahkan bagi pembicara untuk menarik empati audience.

1. Sesi keempat dilanjutkan diskusi dan penetapan kesepakatan tindak lanjut dari kegiatan ini.

Dari diskusi yang berkembang maka ditarik kesimpulan :

* Melakukan pembinaan dengan meningkatkan kemampuan advokasi dan KIE kespro remaja bagi pejabat pada OPD PPKB
* Melakukan pemantauan dan evaluasi ke Kabupaten/Kota
* Menggunakan dan mengembangkan materi KIE Kesehatan Reproduksi remaja sesuai panduan BKKBN
* Menyampaikan laporan ke Gubernur dan mengirimkan hasil pemantauan dan evaluasi ke Mendagri cq. Dirjen Bina Bangda
* Membuat surat edaran Gubernur Ke Bupati/Walikota Kab/Kota untuk mengaktifkan dan mengembangkan PIK R yang sudah ada
* Membuat surat ke Dinas Pendidikan, Kemenag Provinsi agar membuat surat edaran kepada :
* Dinas Pendidikan Kab/Kota agar Kepala SMP mengaktifkan PIK R yang sudah ada di SMP, baik negeri maupun swasta
* Kepala SMA/SMK se Sumatera Barat untuk mengaktifkan bagi yang pasif, meningkatkan kualitas PIK R, atau membentuk PIK R bagi yang belum terbentuk baik negeri maupun swasta
* Mengaktifkan PIK R yang ada pada MTs dan MA baik negeri atau pun swasta
* Melakukan kerjasama dengan ormas/orsos di bidang remaja
1. **Kendala dan Hambatan**
	* + 1. Sulitnya dalam pembinaan kelompok PIK Remaja Sekolah dan Masyarakat karena keterbatasan SDM Pengelola dan minimnya pendanaan.
			2. Masih kurangnya kepedulian dan komitmen pejabat pengelola kelompok PIK R dalam pengembangan kelompok PIK remaja baik jalur masyarakat maupun jalur sekolah.
			3. Pengaruh mutasi pejabat dilingkungan OPD KB sering terjadi sehingga regenerasi kepengurusan kelompok PIK R yang harus diganti setiap tahunnya sering mengalami keterlambatan dan bahkan terabaikan

**BAB III**

**HASIL YANG DICAPAI**

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan Advokasi KIE Kesehatan Reproduksi Remaja tahun 2019 yang dilaksanakan pada pada tanggal 14 s.d 15 Agustus 2019 di Hotel Amaris Jalan Sudirman nomor 91 Padang, dengan peserta 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari Pejabat pengelola kelompok PIK R yang ada di Dinas PPKB dan Guru-guru Pembina kelompok PIK R sekolah Kabupaten Kota se Sumatera Barat, merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan komitmen Pengelola dan Pembina Kelompok PIK R tentang kesehatan hak-hak reproduksi remaja, juga meningkatkan edukasi pemahaman sikap dan perilaku positif remaja yang jauh dari narkoba, pergaulan bebas dan HIV AIDs serta memiliki wawasan untuk penyiapkan kehidupan berkeluarga.

* + 1. **Hasil Yang Diharapkan**

Melalui kegiatan ini yang merupakan upaya preventif dan promotif dalam mengatasi permasalahan remaja maka diharapkan kepada OPD PPKB Kabupaten Kota agar :

1. Meningkatkan peran Guru BK dan Pejabat OPD PPKB selaku pengelola dan pembina kelompok PIK R sekolah lebih proaktif dalam membina dan mengembangkan kelompok-kelompok PIK R yang sudah ada, sehingga bermanfaat bagi remaja dilingkup sekolah dan masyarakat.
2. Membentuk Tim Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja yang terdiri dari Dinas yang menangani PP KB , Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda Olah raga, dan Dinas terkait lainnya untuk bersama-sama melakukan sinergi program kegiatan dalam mengatasi permasalahan remaja.
3. Melakukan pemetaan kelompok PIK R untuk semua sekolah seperti SMP, MTs SMA, SMK dan MA
4. Melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah bahwa kegiatan penyuluhan dan sosialisasi agar lebih efektif dilakukan pada kegiatan ekstra kurikuler di hari krida/sabtu dengan menghidupkan komunikasi dua arah antara narasumber dengan siswa.
5. Mengalokasikan anggaran melalui program kegiatan untuk pembinaan kelompok PIK R Sekolah, dengan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok PIK R.
	* 1. **Capaian Realisasi Anggaran**

Kegiatan Advokasi KIE KEsehatan Reproduksi Remaja Tahun 2019 yang pembiayaannya dibebankan pada DPA- OPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPPKBKPS) Provinsi Sumatera Barat No. DPA-OPD : 1.02.08.1.02.08.01.111.001 tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp. 39.120.000,- (tiga puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan realiasasi fisik 100 persen dan realiasasi keuangan sebesar 99,90%, dengan rincian seperti yang diuraikan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | Fisik (%) | Keu (%) |
| 1. | ATK | 2.747.000 | 2.747.000 | - | 100 % | 100 % |
| 2. | BBM |  542.000 |  542.000 | - | 100 % | 100 % |
| 3. | Seminar Kit Peserta | 2.500.000 | 2.500.000 |  | 100% | 100 % |
| 4. | Spanduk |  300.000 |  300.000 | - | 100 % | 100 % |
| 5. | Akomodasi peserta +panitia | 17.500.000 | 17.500.000 |  | 100% | 100% |
| 6. | Jasa Narsumber+ tenaga ahli | 4.000.000 | 4.000.000 | - | 100% | 100% |
| 7. | Jasa MC |  150.000 |  150.000 | - | 100% | 100% |
| 8. | Jasa Moderator | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 100% | 100% |
| 9. | Jasa pembaca doa |  150.000 |  150.000 | - | 100% | 100% |
| 6. | Penggandaan | 1.051.000 | 1.051.000 | - | 100 % | 100 % |
| 7. | Makan Minum Rapat |  520.000 |  520.000 | - | 100 % | 100 % |
| 8. | Perjalanan Dinas |  |  | - | 100 % | 100 % |
|  | Dalam Daerah | 8.160.000 | 8.120.000 | 40.000 | 100 % | 99,51 % |
|  | Jumlah | 39.120.000 | 39.080.000 |  40.000 | 100% | 99,90% |

**BAB IV**

**P E N U T U P**

1. **Kesimpulan**

Melalui kegiatan Advokasi KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2019 dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain adalah :

* + - 1. Peserta lebih memahami perannya sebagai pembina dan pengelola kelompok PIK R dalam mengedukasi siswa agar berperilaku positif ditengah masyarakat dan lebih mengerti tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi remaja.
			2. Peserta lebih mampu melakukan usaha preventif dan promotif untuk meningkatkan kapasitas anggota dan pengurus kelompok PIK R sekolah dalam hal melakukan konseling terhadap lingkungan remaja sekolah dan masyarakat.
			3. Terwujudnya persamaan persepsi pembina dan pengelola kelompok PIK R Sekolah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok PIK R.
1. **Saran**
	* + 1. Perlunya peningkatan wawasan dan pengetahuan pengelola dan pembina kelompok PIK R dalam hal kesehatan dan hak-hak reproduksi remaja.
			2. Perlunya peningkatan peran dan komitmen pengelola dan pembina kelompok PIK R dalam pembentukan dan pengembangan kelompok PIK R sekolah
			3. Perlunya meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemenag, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lainnya dalam integrasi kegiatan peningkatan wawasan kesehatan dan hak-hak reproduksi remaja, baik terhadap guru-guru dan pejabat pembina maupun siswa.
			4. Karena pengaruh informasi teknologi perlunya adanya fasilitasi dan advokasi kesehatan reproduksi remaja ini secara berkesinambungan dan terus menerus.